

Daftar Pustaka

Buku :

- Ardiani, N. D., & Ns, M. K. 2020. *Modul Ajar Etika Keperawatan*.
- Azwar, Asrul. 1994. *Manajemen Kualitas Pelayanan Kesehatan*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta,
- Daan Suganda, 1992, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, Pemerintahan di Daerah*,. Bandung : Sinar Baru.
- Kamal Hidjaz, 2010, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia* , Makassar: Pustaka refleksi.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum* Mataram, Mataram University Press.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Poerwardarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Ridwan, H. R. (2014). *Diskresi & tanggung jawab pemerintah*. FH UII Press.
- soekidjo Notoatmodjo, 2010, *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sri Siswati, 2013, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Rajawali Pers, Jakarta
- The Liang Gie, *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta.
- Titin Rohayatin, 2021 *Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan* Yogyakarta: Deepublish
- Y.A.Triana Ohoiwutun 2007, *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*, Malang: Bayu Media Publising.

Jurnal :

- Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali Ramdhani 2017, “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik,” *Jurnal Publik*, Vol. 11, No. 1
- Bihuku, S.(2018) *Urusan Pemerintahan Konkuren menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lex Administratum*, No 6 Vol 11
- Diasa Inas Wishesa, (2020) „Kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Pengawasan Sistem Merit“, *Jurist-Diction*, Vol. 3, No. 5

- Hamidi, J. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 23 No 4
- Jauhari, A. (2017). Pendidikan inklusi sebagai alternatif solusi mengatasi permasalahan sosial anak penyandang disabilitas. *IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching*, Vol 1 No 1
- Musoliyah, A. (2019). Pemenuhan Hak-hak Anak Berkebutuhan Khusus dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas: Studi Kasus Di Desa Sonoagung Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. Sakina: *Journal of Family Studies*, Vol 3 No 2
- Ndaumanu, F. (2020). Hak penyandang disabilitas: Antara tanggung jawab dan pelaksanaan oleh pemerintah daerah. *Jurnal Ham*, Vol 11 No.1
- R. Agus Abikusna, (2020) “Kewenangan Desa Dalam Penanggulangan Wabah COVID-19,” *Jurnal Sosfilkom*, Vol. 14, No. 2
- roni Rustandi, (2017) „Kajian Teoritis Fungsi Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015“, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1.
- Rumbemba, D. (2020). Kerjasama Internasional dalam Mendukung Usaha Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. *LEX ADMINISTRATUM*, Vol 8 No 4
- Taqwin, A. (2016). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Terhadap Pelayanan Publik. *Universitas Muhammadiyah Jember*, vol 1 no 27
- Wulansari, Y., & Prabawati, I. (2021). Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Studi Aksesibilitas Bangunan Umum di Stasiun Malang Kota Baru). *Publika*,
- Wm, M. P., Soebiyanto, A. W., & Limijadi, E. K. S. (2021). Analisis Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Informasi Dan Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Penyandang Disabilitas Di Kota Semarang. *Jurnal Usm Law Review*, No 4 Vol 2
- Zaini Ali, (2017) „Peranan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah“, Wedana: Kajian Pemerintah, Politik Dan Birokrasi, Vol. 3, No. 2

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Republik Indonesia 1945
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan

Website :

<https://www.kemerkopmk.go.id/pemerintah-penuhi-hak-penyandang-disabilitas-di-indonesia> di akses pada 14 oktober 2023

<https://harjomulyo.web.id/> di akses pada 25 november 2023

<https://www.kemerkopmk.go.id/pemerintah-penuhi-hak-penyandang-disabilitas-di-indonesia> di akses pada 15 februari 2024

<https://radarjember.jawapos.com/jember/793354885/puluhan-ribu-penyandang-disabilitas-di-jember-belum-mendapatkan-dukungan-penuh-dari-pemerintahan-daerah> di akses pada 27 maret 2024